

TESIS

**REKONSTITUSI
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
DITINJAU DARI ASAS REPRESENTASI
POLITIK WILAYAH**



Oleh
GALUH FERGINA FRIZDAMELIA
NIM. 2220215320015

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**REKONSTITUSI
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
DITINJAU DARI ASAS REPRESENTASI
POLITIK WILAYAH**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

**GALUH FERGINA FRIZDAMELIA
NIM. 2220215320015**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

Judul Tesis : REKONSTITUSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(DPD) DITINJAU DARI ASAS REPRESENTASI
POLITIK WILAYAH

Nama : Galuh Fergina Frizdamelia
NIM : 2220215320015

**Disetujui,
Pembimbing**



Dr. Hj. Erlina, SH., MH
NIP. 19780502 200112 2 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Tanggal Lulus :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Wisuda :

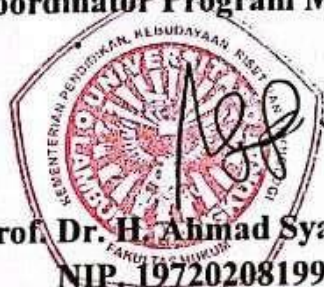
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



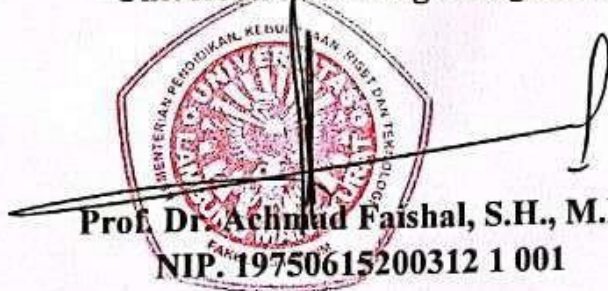
**Dr. Hj. Erlina, SH., MH
NIP. 19780502 200112 2 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galuh Fergina Frizdamelia
NIM : 2220215320015
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Galuh Fergina Frizdamelia
NIM. 2220215320015

FERGINA, GALUH. 2024. "Rekonsitusi DPD ditinjau dari Asas Representasi Politik Wilayah". Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 172 halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini membahas kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam perspektif Undang-Undang MD3 dan Konstitusi Indonesia. Pada Bab II, dibahas konsep bikameralisme pada lembaga negara Indonesia dan keterbatasan kewenangan DPD dalam UU MD3. Keterbatasan ini terlihat dalam beberapa pasal yang tidak merefleksikan pasal-pasal pada UUD 1945, khususnya Pasal 249 UU MD3 yang tidak mencerminkan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945. Sejarah pembentukan DPD dan tujuan dalam konstitusi juga diulas, menunjukkan bahwa UU MD3 belum sepenuhnya mengakomodasi amanat UUD 1945 terkait DPD.

Bab III membahas upaya rekonstitusi UUD 1945 terkait kedudukan DPD dari perspektif representasi politik wilayah. Ditekankan pentingnya memperkuat kedudukan DPD dalam UU MD3 untuk memberikan kewenangan lebih dalam proses legislasi, khususnya dalam pembuatan undang-undang sektoral provinsi. Bab ini juga menyoroti konsep representasi politik wilayah dan desentralisasi, serta peran DPD dalam mewujudkan representasi politik wilayah yang efektif. Rekonstitusi diperlukan untuk menyelaraskan peran DPD dengan tujuan awal pembentukannya dalam UUD 1945.

Penelitian ini mengidentifikasi dampak keterbatasan kewenangan DPD terhadap representasi daerah. Implikasi hukum dari keterbatasan ini termasuk berkurangnya pengaruh DPD dalam legislasi dan representasi daerah yang tidak optimal. Penelitian ini menyarankan penambahan pasal dalam UU MD3 untuk memberikan DPD kewenangan lebih dalam proses legislasi dan memperkuat peran DPD dalam sistem legislatif Indonesia. Dengan kewenangan yang diperkuat, DPD diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pembentukan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Penelitian ini juga mengusulkan perubahan dalam naskah konstitusi untuk mempertegas peran DPD. Salah satu saran adalah memberikan DPD hak veto terhadap rancangan undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan asas desentralisasi asimetris. Selain itu, DPD juga berwenang mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan. Usulan ini bertujuan memastikan desentralisasi asimetris berjalan efektif dengan kebijakan sektoral yang spesifik untuk setiap provinsi.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan DPD dalam UU MD3 belum mewujudkan amanat tujuan pembentukannya dalam konstitusi. Untuk itu, disarankan adanya penambahan pasal dalam UU MD3 dan perubahan dalam konstitusi untuk memberikan DPD peran yang lebih signifikan dalam proses legislasi dan pengawasan pelaksanaan undang-undang. Penelitian ini juga mengusulkan mekanisme untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan perundang-undangan lanjutan yang diagendakan dalam Prolegnas tahun berikutnya.

FERGINA, GALUH. 2024. “Rekonstitusi DPD ditinjau dari Asas Representasi Politik Wilayah”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 170 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : DPD, Undang-Undang MD3, Konstitusi Indonesia, kewenangan, representasi politik wilayah, desentralisasi asimetris

Penelitian ini mengkaji kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam perspektif Undang-Undang MD3 dan Konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang MD3, DPD memiliki keterbatasan kewenangan yang tidak sepenuhnya merefleksikan amanat Pasal 22D UUD 1945. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas DPD dalam mewakili daerah dan berkontribusi dalam proses legislasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi dampak hukum dari keterbatasan tersebut dan mengusulkan perubahan dalam UU MD3 dan konstitusi untuk memperkuat peran DPD. Usulan perubahan mencakup pemberian hak veto kepada DPD terhadap rancangan undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan pemberian kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah. Dengan perubahan ini, diharapkan DPD dapat lebih efektif dalam mewujudkan representasi politik wilayah dan mendukung desentralisasi asimetris di Indonesia.

FERGINA, GALUH. 2024. " Reconstitution of DPD from the Perspective of Regional Political Representation Principles" Master Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 170 pages.

ABSTRACT

Keywords : DPD, MD3 Law, Indonesian Constitution, authority, regional political representation, asymmetric decentralization

This study examines the status and authority of the Regional Representative Council (DPD) from the perspective of the MD3 Law and the Indonesian Constitution. In the MD3 Law, the DPD has limited authority that does not fully reflect the mandate of Article 22D of the 1945 Constitution. These limitations affect the effectiveness of the DPD in representing regions and contributing to the legislative process. The study also identifies the legal implications of these limitations and proposes changes to the MD3 Law and the Constitution to strengthen the role of the DPD. The proposed changes include granting the DPD veto power over draft laws that conflict with regional interests and granting supervisory authority over the implementation of laws related to regional autonomy. With these changes, the DPD is expected to be more effective in realizing regional political representation and supporting asymmetric decentralization in Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“REKONSTITUSI DPD DITINJAU DARI ASAS REPRESENTASI POLITIK WILAYAH”** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
5. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Yang Terpelajar Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;
8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta

membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;

9. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan tesis ini;
10. Orang tua tercinta Penulis, yang telah membesarkan dan merawat Penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan yang tiada henti baik secara moral maupun materiil untuk kesuksesan Penulis;
11. Ananda Aezza Naadhirah, yang menjadi sumber motivasi dan inspirasi penulis;
12. Adik-adik Penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis;
13. Untuk sahabat tercinta yang menjadi bagian cerita selama masa perkuliahan berlangsung, atas kenangan-kenangan yang tidak terlupakan semasa kuliah yang selalu diingat dan tak akan dilupakan oleh Penulis;
14. Teman-teman dalam Program Kekhususan Hukum Tata Negara angkatan 2022, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta informasi kepada Penulis;
15. Teman-teman angkatan 2022 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini;
16. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis,

Galuh Fergina Frizdamelia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN
HALAMAN JUDUL DALAM
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN
RINGKASAN
ABSTRAK
DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Keaslian Penelitian.....	9
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
	E. Tinjauan Pustaka	11
	F. Metode Penelitian	37
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	41
BAB II	KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DPD DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MD3 DAN KONSTITUSI	
	A. Kedudukan DPD dalam Undang-Undang MD3	43
	1. Konsep Bikameralisme pada Lembaga Negara Indonesia.....	48
	2. Keterbatasan Kewenangan DPD dalam UU MD3.....	56
	B. Kewenangan DPD dalam Konstitusi	63
	1. Sejarah Pembentukan dan Tujuan DPD dalam Konstitusi	65
	2. Keselarasan UU MD3 dengan <i>Amanat</i> Pembentukan DPD pada UUD 1945.....	75
	C. Dampak Keterbatasan Kewenangan DPD terhadap Representasi Daerah	86
	1. Implikasi Hukum Keterbatasan Kewenangan DPD.....	88
	2. Implikasi Keterbatasan Kewenangan DPD Terhadap Representasi Daerah	91
BAB III	UPAYA UPAYA REKONSTITUSI UUD 1945 TERKAIT KEDUDUKAN DPD DITINJAU DARI REPRESENTASI POLITIK WILAYAH	
	A. Rekonstitusi Kedudukan DPD dalam UU MD3	98
	1. Hakikat Rekonstitusi.....	98
	2. Legitimasi Rekonstitusi UUD 1945 terkait Kedudukan DPD.....	107
	B. Representasi Politik Wilayah dalam Konstitusi.....	111
		111
		118

1. Konsep Representasi Politik Wilayah dan Desentralisasi.....	
2. Tujuan Representasi Wilayah dalam Desentralisasi Asimetris.....	
3. Kedudukan DPD dalam Mewujudkan Representasi Politik Wilayah.....	
C. Implikasi Perubahan Kedudukan DPD terhadap Representasi Politik Wilayah.....	132
1. Wacana Pemisahan UU MD3 (DPR, DPD dan MPR).....	132
2. Prospek Kedudukan (Ius Constituendum) DPD dalam Sistem Politik Indonesia	137
3. Mekanisme Tindaklanjut Putusan MK sebagai Legitimasi Rekonstitusi.....	150
 BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	170
B. Saran.....	170

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP